

Strategi Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan untuk Kesejahteraan Personel TNI AD di Denmabesad

Hendra Prawira MS¹ Thomas Gabriel² Sigit Purwanto³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: mail4hendra@gmail.com¹ jostgebi@gmail.com² sigit.purwanto@idu.ac.id³

Abstrak

Pengelolaan keuangan di satuan kerja Detasemen Markas Besar TNI AD (Denmabesad) memiliki karakteristik tersendiri dibanding satker TNI AD pada umumnya yaitu memiliki banyak sub satuan kerja, personel dalam jumlah besar dengan mutasi tinggi, seringnya revisi pagu anggaran oleh Eselon I TNI AD, dan adanya titipan anggaran Unit Organisasi (U.O) TNI AD. Kondisi ini berdampak pada permasalahan kesejahteraan personel, seperti kerawanan anomali Tunjangan Kinerja, kurang transparansi pembayaran Gaji dan tunjangan, belum adanya pengawasan anggaran hingga level sub satuan kerja, pelaporan rutin Keuangan Satker masih manual, dan pengajuan dana pensiun ke Asabri serta pengembalian Iuran TWP AD secara manual (belum otomatis). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan tersebut serta menganalisis fungsi aplikasi digitalisasi yang dikembangkan oleh Paku Denmabesad yang dikenal dengan SIMPAKU (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terpadu) sebagai strategi optimalisasi aplikasi keuangan eksisting. Penelitian dilakukan di Denmabesad menggunakan metode kualitatif deskriptif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan disintegrasi antara My GPP, Sisfopers, dan SAKTI menjadi akar permasalahan kesejahteraan personel. Optimalisasi SIMPAKU disimpulkan mampu meningkatkan ketepatan pembayaran hak keuangan, transparansi, kecepatan layanan kesejahteraan, kualitas perencanaan anggaran, serta kesiapan administrasi masa purna tugas Prajurit.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Keuangan, SIMPAKU, Kesejahteraan Personel, TNI Angkatan Darat

Abstract

Financial management within the Detachment of the Indonesian Army Headquarters (Denmabesad) has distinctive characteristics compared to other Army work units, namely having numerous sub-work units, a large number of personnel with high mutation rates, frequent budget-ceiling revisions by the Army's Echelon I, and entrusted budget allocations from other Army Organizational Units (U.O). These conditions affect personnel welfare, giving rise to problems such as vulnerability to Performance Allowance anomalies, limited transparency in salary and allowance payments, the absence of budget monitoring down to the sub-work-unit level, routine work-unit financial reporting that is still manual, and manual (not yet automated) submission of pension funds to Asabri as well as refunds of TWP AD (Army Housing Savings) contributions. This study aims to identify these problems and analyze the function of a digitalization application developed by the Denmabesad Finance Officer (Paku), known as SIMPAKU (Integrated Financial Management Information System), as a strategy for optimizing existing financial applications. The research was conducted at Denmabesad using a descriptive qualitative case study method, with data collection techniques comprising interviews, observation, and documentation study. The results show that the lack of integration among My GPP, Sisfopers, and SAKTI is the root cause of personnel welfare problems. Optimizing SIMPAKU is concluded to be capable of improving the accuracy of financial-rights payments, transparency, the speed of welfare services, the quality of budget planning, and administrative readiness for soldiers' retirement.

Keywords: Financial Management Information System, SIMPAKU, Personnel Welfare, Indonesian Army



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Kesejahteraan personel merupakan salah satu faktor determinan bagi kesiapan dan moril prajurit dalam melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Darat, terutama dalam hal pemenuhan hak keuangan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan transparan, meliputi gaji, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, uang lauk-pauk, hingga hak pensiun pada masa purna tugas. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa optimalisasi sistem informasi manajemen keuangan berbasis elektronik dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi pengelolaan keuangan instansi pemerintah, termasuk pada institusi pertahanan. Penelitian mengenai optimalisasi sistem informasi pada organisasi pemerintah dan militer telah banyak dilakukan dalam sepuluh tahun terakhir. Utami, Khairi, dan Sartika (2024) meneliti strategi penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada instansi pemerintah menggunakan analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menemukan bahwa strategi optimalisasi perlu dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara kondisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Suryawan dan Ginting (2023) meneliti optimalisasi sistem informasi personel TNI AL melalui pemanfaatan Internet of Things, menemukan bahwa integrasi teknologi informasi secara optimal sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi militer. Sagala dan Firdaus (2024) menemukan bahwa optimalisasi sistem informasi manajemen dalam mewujudkan e-government mencakup peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui integrasi dan otomatisasi proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji optimalisasi sistem informasi pada berbagai konteks organisasi pemerintah dan militer, penelitian khusus yang mengkaji strategi optimalisasi sistem informasi manajemen keuangan personel di lingkungan TNI AD, dengan menganalisis kesenjangan antara tiga sistem eksisting yang berjalan terpisah (MyGPP, Sisfopers, dan SAKTI), serta merumuskan strategi optimalisasi melalui pengembangan aplikasi manajemen keuangan Paku yang tertegrasi dan otomatis dan dinamakan Simpaku (SIMPAKU), belum ditemukan. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian sistem informasi keuangan personel TNI AD yang belum pernah diteliti secara akademis, serta pendekatan kualitatif deskriptif yang menggali kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan pada ketiga sistem existing secara bersamaan, sebagai dasar perumusan strategi optimalisasi yang komprehensif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi nyata (fakta) pengelolaan keuangan personel di Denmabesad ditinjau dari penggunaan MyGPP, Sisfopers, dan SAKTI saat ini; (2) menganalisis kondisi yang diharapkan (ideal) atas pengelolaan keuangan personel guna menunjang kesejahteraan personel; dan (3) merumuskan strategi optimalisasi sistem informasi manajemen keuangan (SIMPAKU) guna menjembatani kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan di lingkungan Denmabesad.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengaitkan integrasi sistem informasi keuangan dengan karakteristik satuan kerja militer yang memiliki banyak sub satuan, mutasi personel tinggi, dan pola revisi anggaran berjenjang dari Eselon I masih terbatas. Kesenjangan (gap) inilah yang menjadi landasan pentingnya penelitian pada satuan kerja Denmabesad, yang memiliki karakteristik: (a) terdiri dari banyak sub satuan kerja; (b) jumlah personel besar dengan mutasi tinggi; (c) seringnya revisi anggaran oleh Eselon I TNI AD yang mengubah pagu anggaran; dan (d) adanya titipan alokasi anggaran milik unit organisasi (U.O) TNI AD lain. Pada aspek kesejahteraan personel, ditemukan bahwa aplikasi Sisfopers belum terintegrasi dengan pola pembinaan karier sehingga database personel belum termutakhirkan dan belum valid untuk memverifikasi pengajuan gaji dan tunjangan kinerja setiap bulan, menimbulkan kerawanan anomali tunjangan kinerja sebagaimana pernah terjadi pada tahun 2017–2022.

Transparansi pembayaran gaji dan tunjangan juga masih rendah karena slip gaji umumnya tidak dicetak dan tidak dikirimkan kepada personel, sementara Data Riwayat Penggajian (Ku-11) sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, belum tersedia sarana pengawasan realisasi anggaran hingga tingkat sub satuan kerja sehingga masih terdapat sisa murni anggaran pada akhir tahun, penyusunan laporan rutin Paku Denmabesad masih manual, dan prosedur pengajuan dana pensiun ke Asabri dan pengembalian Iuran TWP AD masih dilakukan secara manual yaitu para Pensiunan harus mengirimkan persyaratan administrasi ke Asabri dan TWP AD secara berjenjang.

Permasalahan tersebut bersumber dari belum terintegrasinya aplikasi My GPP (dioperasikan Juru Bayar), Sisfopers (dioperasikan Siepers Denma), dan SAKTI (dioperasikan Staf Paku dan Sie Renprogar), yang menimbulkan kerawanan inkonsistensi data dan lambatnya proses pelaporan. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan di satuan kerja Denmabesad; (2) mengidentifikasi permasalahan bidang kesejahteraan personel di Denmabesad; (3) mengidentifikasi kelemahan sistem aplikasi keuangan yang digunakan di lingkungan TNI AD dikaitkan dengan uraian tugas Ku Denmabesad; dan (4) menganalisis fungsi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terpadu (SIMPAKU) sebagai strategi optimalisasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus (case study) di satuan kerja Denmabesad. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pengelolaan keuangan dan kesejahteraan personel bersifat kontekstual dan memerlukan pemahaman mendalam atas proses, hambatan, dan persepsi pemangku kepentingan yang tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan kunci, yaitu Staf Keuangan (Ku) Denmabesad, Staf Rencana dan Program Anggaran (Renprogar), Seksi Personel (Siepers), dan personel militer sebagai penerima manfaat; observasi terhadap alur proses penggajian, verifikasi tunjangan kinerja, dan pengawasan anggaran; serta studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan keuangan, dan dokumentasi sistem aplikasi My GPP, Sisfopers, dan SAKTI. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), dibantu pedoman wawancara dan lembar observasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan data.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Research Result

Hasil penelitian pada aspek pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa kompleksitas satuan kerja Denmabesad tercermin dari empat karakteristik, yaitu banyaknya sub satuan kerja, tingginya mutasi personel, seringnya revisi pagu anggaran oleh Eselon I TNI AD, dan adanya titipan anggaran U.O TNI AD lain yang harus dipisahkan pencatatannya dari anggaran murni Denmabesad. Pada aspek kesejahteraan personel, ditemukan enam permasalahan utama sebagai berikut.

- Aplikasi Sisfopers belum terintegrasi dengan pola pembinaan karier sehingga database personel belum termutakhirkan dan belum valid untuk verifikasi gaji dan tunjangan kinerja bulanan.
- Slip gaji umumnya tidak dicetak/dikirimkan ke personel dan Data Riwayat Penggajian (Ku-11) sudah tidak digunakan.
- Belum tersedia sarana pengawasan realisasi anggaran sampai tingkat sub satuan kerja.

- Penyusunan laporan rutin Paku Denmabesad masih manual.
- Sisa murni anggaran akhir tahun belum dapat dialihkan secara sistemik untuk mendukung kesejahteraan moril personel.
- Prosedur penentuan dana pensiun ke Asabri masih diajukan secara manual.

Pada aspek kelemahan sistem aplikasi, ditemukan bahwa My GPP, Sisfopers, dan SAKTI dioperasikan oleh unsur kerja yang berbeda (Juru Bayar, Staf Siepers Denmabesad, serta Staf Paku dan Sie Renproggar) tanpa keterhubungan elektronik satu sama lain, sehingga verifikasi data personel dengan data pembayaran harus dilakukan secara manual lintas aplikasi.

Discussion

Data yang disajikan menunjukkan bahwa akar permasalahan kesejahteraan personel di Denmabesad bersumber dari lemahnya integrasi data antara sistem kepegawaian (Sisfopers) dan sistem keuangan (My GPP dan SAKTI). Ketiadaan pembaruan data personel secara real time menjadi penyebab langsung kerawanan anomali tunjangan kinerja, karena verifikasi pengajuan tukin bulanan tidak dapat disandingkan secara otomatis dengan status jabatan dan mutasi personel terbaru. Temuan mengenai rendahnya transparansi slip gaji dan tidak digunakannya Ku-11 menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan personel untuk mengetahui rincian haknya dan kapasitas sistem yang tersedia untuk menyediakan informasi tersebut secara individual dan berkala. Demikian pula, ketiadaan sarana pengawasan anggaran hingga sub satuan kerja menjelaskan mengapa sisa murni anggaran masih muncul setiap akhir tahun, padahal dana tersebut berpotensi dialihkan untuk mendukung kesejahteraan moril personel apabila tersedia mekanisme pemantauan realisasi secara berjenjang dan tepat waktu.

Sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang mengedepankan integrasi data, akurasi, dan akuntabilitas, optimalisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terpadu (SIMPAKU) relevan digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. SIMPAKU memberikan kontribusi antara lain pada: (1) ketepatan dan kecepatan pembayaran hak prajurit, karena gaji, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan uang lauk-pauk dapat diproses dan dicairkan lebih tepat waktu melalui integrasi data elektronik, sekaligus menekan risiko kesalahan hitung; (2) transparansi dan akuntabilitas, melalui penyediaan slip gaji digital dan riwayat pembayaran yang dapat dipantau personel sehingga mengurangi kecurigaan atau sengketa terkait potongan yang tidak jelas; (3) percepatan layanan administrasi kesejahteraan, karena klaim kesehatan, tunjangan pendidikan anak, dan bantuan sosial dapat diproses lebih cepat dengan data personel dan keluarga yang sudah tersimpan dalam sistem; (4) perbaikan perencanaan anggaran kesejahteraan, karena realisasi anggaran dapat dipantau secara real time sehingga alokasi program kesehatan, perumahan, dan pendidikan personel dapat direncanakan lebih akurat; (5) kemudahan akses dan pengurangan beban birokrasi, karena personel di daerah terpencil dapat mengurus hak keuangannya secara elektronik tanpa harus datang langsung ke satuan pusat; dan (6) dukungan kesiapan menghadapi masa purna tugas, karena data keuangan yang tertata rapi memudahkan penghitungan pesangon dan pensiun, termasuk pada prosedur pengajuan dana pensiun ke Asabri yang selama ini masih manual.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa optimalisasi sistem informasi bukan sekadar persoalan teknis penggantian aplikasi, melainkan strategi manajerial yang menjembatani kebutuhan integrasi data personel dan keuangan pada satuan kerja dengan karakteristik kompleks seperti Denmabesad. Hasil ini juga konsisten dengan temuan penelitian pada instansi pemerintah lain bahwa keberhasilan optimalisasi sistem informasi keuangan sangat ditentukan oleh derajat integrasi antar-aplikasi dan komitmen pengawasan berjenjang, dan

sekaligus melengkapi kajian tersebut dengan konteks spesifik satuan kerja militer yang memiliki pola mutasi dan revisi anggaran yang unik.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan kesejahteraan personel di Denmabesad, meliputi kerawanan anomali tunjangan kinerja, rendahnya transparansi penggajian, lemahnya pengawasan anggaran di tingkat sub satuan kerja, pelaporan Ku Satker masih manual, dan prosedur pengajuan dana pensiun yang belum otomatis, bersumber dari belum terintegrasinya aplikasi Sisfopers, My GPP, dan SAKTI yang digunakan oleh unsur kerja berbeda di lingkungan Denmabesad. Optimalisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terpadu (SIMPAKU) terbukti secara konseptual mampu menjawab permasalahan tersebut melalui peningkatan ketepatan pembayaran hak prajurit, transparansi dan akuntabilitas, kecepatan layanan kesejahteraan, kualitas perencanaan anggaran, kemudahan akses bagi personel di daerah terpencil, serta kesiapan administrasi masa purna tugas. Penelitian ini terbatas pada studi kasus di satu satuan kerja sehingga generalisasi pada satuan kerja TNI AD lain perlu dilakukan secara hati-hati; penelitian lanjutan disarankan untuk mengukur kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam mendukung implementasi SIMPAKU secara menyeluruh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan staf Denmabesad, serta pembimbing tesis, atas dukungan data dan arahan selama penelitian berlangsung.

BIBLIOGRAPHY

- Ahmad, S. (2020). *Manajemen Strategis: Konsep dan Aplikasi dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kontan.co.id. (2024). Gaji TNI 2024 Naik Sesuai PP Nomor 6 Tahun 2024.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tugas Detasemen Markas Besar TNI Angkatan Darat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- Sagala, A., & Firdaus, R. (2024). Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Mewujudkan E-Government. *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, 2(3), 8–16. doi.org/10.62951/bridge.v2i3.93
- Setiawan, Y., & Munandar, A. (2025). Aplikasi MonSAKTI: Kunci Menuju Laporan Keuangan Pemerintah yang Berkualitas. *INOVASI*, 12(1), 327–337. doi.org/10.32493/Inovasi.v12i1.p327-337.46969
- Suryawan, W. E., & Ginting, M. L. (2023). Optimalisasi Sistem Informasi Personel dengan Menggunakan Internet of Things dalam Rangka Mendukung Tugas TNI AL. *SATIN – Sains dan Teknologi Informasi*, 9(1), 93–106. doi.org/10.33372/stn.v9i1.956
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



Utami, R. D., Khairi, A., & Sartika, D. (2024). Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan (JIPK)*, 26(1), 1–16. doi.org/10.7454/JIPK.v26i1.1102